

SEPERCIK AJARAN AGAMA YANG MEMBERDAYAKAN (Pemberdayaan Komunitas Miskin Kelayan B Banjarmasin Kalimantan Selatan)

*Oleh: Humaidy dan Abu Bakar **

Abstrak

Cara hidup orang kota dan kehidupan kota gemerlap seperti kota Banjarmasin ini, dimana segala sumber kehidupan termasuk hiburan ada di sini, tentu saja menarik minat sebagian orang untuk bersaing dan mencari penghasilan yang lebih menjanjikan. Sebagian orang desa misalnya ingin pergi ke kota karena di kota banyak hiburan, banyak lapangan kerja, dan kelihatan mudah mencari uang. Mayoritas masyarakat Kelayan B Banjarmasin berprofesi sebagai buruh. Masyarakat Kelayan B di Banjarmasin sering diidentikkan dengan masyarakat negatif. Mereka sering dianggap sebagai masyarakat "buangan", kurang diperhatikan dan cenderung diabaikan. Heterogenitas yang ada pada masyarakat ini sering menghasilkan konflik dan menjadikan kehidupan di masyarakat ini kurang "nyaman". Masyarakat ini selain memiliki kriminalitas dan kualitas hidup yang rendah, namun memiliki pula tokoh-tokoh agama (ulama) yang cukup banyak bahkan bisa dikatakan populer di sekitar Kalimantan Selatan. Harapan mayoritas masyarakat setempat adalah adanya rasa aman, kesejahteraan yang layak, kesehatan yang cukup, pendidikan yang terpenuhi. Tindakan strategis dan ini akan dilakukan melalui berbagai tindakan misalnya pemberdayaan masyarakat, melalui partisipasi dari berbagai pihak terutama masyarakat setempat, tokoh masyarakat, ulama pemerintah, LSM yang diperlukan dalam memaksimalkan strategi pemberdayaan dan lain sebagainya yang dianggap bisa membantu pengabdian ini. Jenis pemberdayaan, kegiatan keagamaan, yaitu pengajian rutin, pelatihan Baca Tulis aksara, pelatihan menabuh genderang, dan sarang burung waled. Akhirnya komunitas preman menjadi akhlak baik dan semangat kerja tinggi serta ingat hidup sesudah mati.

Kata Kunci: Ajaran agama, pemberdayaan, komunitas miskin

A. Isu dan Fokus Penelitian

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota yang paling padat penduduknya di Kalimantan sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang cukup padat ini termasuk salah satu kota besar di Indonesia, walau luasnya yang terkecil di Kalimantan, lebih kecil daripada Jakarta Barat. Kota yang dijuluki "kota seribu sungai" ini merupakan sebuah kota delta atau kota kepulauan sebab terdiri dari sedikitnya 25 buah pulau kecil (delta) yang merupakan bagian-bagian kota yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Sejak zaman dulu hingga sekarang Banjarmasin masih menjadi kota niaga dan bandar pelabuhan terpenting di pulau Kalimantan.

Pelabuhan terpenting kota Banjarmasin adalah pelabuhan Trisakti yang terletak 12,5 mil dari muara sungai Barito. Pelabuhan Trisakti memiliki Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB) yang termasuk 10 besar terminal petikemas di Indonesia. Didukung dengan keberadaan Pelabuhan Lama yang menjadi transit barang untuk menuju Benua Anam. Oleh karena itulah aktivitas perindustrian, perputaran ekonomi, ekspor-impor, pertambangan, transportasi dan lain sebagainya di kota ini sangat ramai dan padat.

Lebih lanjut kota Banjarmasin saat ini masih merupakan pusat pemerintahan meskipun ada upaya untuk memindahkan pusat pemerintahan ini ke daerah Banjarbaru namun masih belum terealisasi secara maksimal. Di Banjarmasin

*Penulis adalah Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari

berbagai lembaga pemerintahan mudah ditemui, dari kantor Gubernur, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga kantor-kantor pemerintahan lainnya sehingga memudahkan masyarakat setempat untuk melakukan berbagai akses yang berkaitan dengan pemerintahan.

Demikian pula halnya dalam masalah pendidikan, kota Banjarmasin masih merupakan salah satu pusat pendidikan masyarakat sebab di sinilah dua perguruan tinggi utama masyarakat Banjarmasin berada yakni Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) yang terletak di jalan H. Hasan Basry kelurahan Banjarmasin Utara dan IAIN Antasari Banjarmasin yang berada di jalan A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin Timur.

Melihat cara hidup orang kota dan kehidupan kota gemerlap seperti kota Banjarmasin ini, dimana segala sumber kehidupan termasuk hiburan ada di sini, tentu saja menarik minat sebagian orang untuk bersaing dan mencari penghasilan yang lebih menjanjikan. Sebagian orang desa misalnya ingin pergi ke kota karena di kota banyak hiburan, banyak lapangan kerja, dan kelihatan mudah mencari uang.

Kepergian penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi masalah jika mereka mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan di kota. Namun, kenyataannya ialah banyak di antara mereka yang datang ke kota tanpa keterampilan kecuali bertani atau hanya bermodal “kenekatan” saja. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mau tidak mau mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian, penjaga malam, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan pekerjaan lain yang sejenis. Otomatis, mereka yang gagal memperoleh pekerjaan sejenis itu menjadi tunakarya, tunawisma, dan tunasusila. Hal itu mendorong mereka melakukan perbuatan yang kurang benar dan merusak lingkungan, misalnya, mendirikan gubuk-gubuk liar di daerah-daerah tertentu seperti di daerah-daerah

bantaran sungai dan membuang sampah sembarangan.

Demikianlah yang sebagian besar terjadi pada daerah Kelayan B, kecamatan Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin. Daerah ini terletak persis di daerah Banjarmasin Selatan dan tidak terlalu jauh dari pusat kota. Wilayah ini pun dilewati oleh sungai Kelayan yang merupakan salah satu sumber kehidupan warga setempat. Sayangnya, wilayah ini meski dekat dengan pusat kehidupan perkotaan masyarakat Banjarmasin dari pemerintahan, bisnis, perindustrian dan pendidikan namun merupakan wilayah yang sudah lazim dikenal sebagai tempat kumuh, padat, cenderung konflik antar masyarakatnya, dan terkesan memiliki kriminalitas yang tinggi. Singkatnya wilayah Kelayan B dikenal sebagai wilayah miskin yang seakan-akan menjadi salah satu “limbah” masyarakat kota Banjarmasin.

Berdasarkan survey awal mayoritas masyarakat Kelayan B Banjarmasin berprofesi sebagai buruh. Berikut ini data jumlah penduduk menurut pekerjaan;

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
Pada Masyarakat Kelayan B
Banjarmasin

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Bidan	2
2	Mantri Kesehatan	9
3	Guru	31
4	PNS	33
5	Buruh	2671
6	Dukun Bayi	1
7	Tukang Cukur	2
8	Tukang Jahit	40
9	Tukang Kayu	6
10	Tukang Batu	22
11	Angkutan/Supir	11
12	TNI/Polri	49
13	Purnabakti PNS/TNI-Polri	24
14	Pedagang	61
15	Tukang Ojek	29
Jumlah		2991

Sumber data: Kantor Kelurahan Kelayan Tengah Banjarmasin Tahun 2013

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan terbanyak adalah buruh dengan jumlah jiwa 2671, sedangkan jenis pekerjaan yang terendah adalah bidan dan dukun bayi.

Oleh karena itu, fokus penelitian yang akan dilakukan di sini adalah upaya pendampingan pada masyarakat Kelayan B Banjarmasin untuk memperbaiki dan memperdayakan kemampuan dan modalitas yang ada pada diri dan sekitar mereka agar bisa hidup lebih baik dari segi kesejahteraan, pendidikan dan lingkungannya sehingga bisa mendapat kepercayaan diri dan memiliki kehidupan yang layak bersama dan dengan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, bisa diringkaskan disini bahwa subyek dampingan dalam penelitian ini rencananya adalah masyarakat Kelayan B, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan yang terkurung dalam kemiskinan diantara kemegahan kehidupan masyarakat kota Banjarmasin.

B. Alasan Memilih Subyek Dampingan

Masyarakat Kelayan B di Banjarmasin sering diidentikkan dengan masyarakat negatif. Mereka sering dianggap sebagai masyarakat "buangan", kurang diperhatikan dan cenderung diabaikan. Kehidupan mereka seakan-akan hanya "pelengkap" dan jika bisa digusur maka akan digusur dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lebih dari itu, ada kesan jika anda ingin mencari para pelaku kriminal yang terjadi di Banjarmasin, maka konon cari saja informasinya di daerah Kelayan ini. Demikian terkenal kumuhnya sampai-sampai mantan wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla, ketika berkunjung ke daerah ini berujar bahwa wilayah Kelayan ini adalah wilayah yang terkotor di seluruh dunia.

Kesan negatif ini tentunya akan semakin terinternalisasi pada masyarakat tersebut karena mereka sudah "terlanjur"

diberi label demikian. Begitu pula, bagi sebagian masyarakat yang lain menjadi antipati dan dengan sendirinya enggan untuk berkunjung ke wilayah ini yang pada ujungnya mengakibatkan semakin menipisnya solidaritas antar masyarakat. Namun hal ini akan berbeda jika masyarakatnya ada upaya untuk melakukan "perlawanan" terhadap *image* tersebut, hanya saja tindakan tersebut sulit untuk disadari oleh mereka jika tidak didampingi dan diaktualisasikan potensi-potensi yang mereka miliki. Potensi-potensi ini sangat berpeluang untuk diaktualisasi mengingat wilayah Kelayan B ini dekat dengan akses pemerintahan, pendidikan dan berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat karena posisinya yang tidak jauh dari pusat kota.

Kondisi inilah yang menjadikan wilayah ini, menurut tim peneliti, layak untuk dijadikan sebagai subyek dampingan sebab keberadaan masyarakat Kelayan B yang begini, mau tidak mau juga memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat lain seperti terjadinya pembunuhan, pencurian, penyebaran narkoba dan lain sebagainya yang biasanya disinyalir berasal dari wilayah Kelayan ini.

C. Kondisi Masyarakat Kelayan B Saat ini

Masyarakat Kelayan B Banjarmasin ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku. Ada yang berasal dari suku Madura, suku Jawa, suku Batak, suku Banjar, suku Dayak dan lain sebagainya. Wilayah ini seakan-akan menjadi wilayah "rujukan" pertama bagi pendatang baru yang ingin bersaing di kota Banjarmasin. Dengan kata lain, kehidupan di masyarakat Kelayan B ini bersifat heterogon.

Heterogonitas yang ada pada masyarakat ini sering menghasilkan konflik dan menjadikan kehidupan di masyarakat ini kurang "nyaman".

Misalnya informasi pada tanggal 26 Juni 2011 ditemukan mayat tanpa identitas di daerah Kelayan B ini, berikut ini kutipan beritanya :¹

Warga kawasan Jalan Kelayan B, Banjarmasin digegerkan temuan mayat pemuda yang bersimbah dalam dalam keadaan dada kiri yang robek berlobang, Minggu (26/6) sekitar pukul 02.30 Wita. Mayat pemuda yang belum diketahui identitasnya itu ditemukan tergeletak di kawasan Jalan Kelayan B, tepatnya di depan warung bakso Ciprot, di seberang Gang Swarga II, Banjarmasin Selatan. "Sekarang kita masih melacak identitasnya, di dekat korban kita temukan sepeda motornya dan sebilah mandau tanpa hulu," ujar Brigadir Sulaiman, anggota Satreskrim Polresta Banjarmasin.

Berita lain misalnya menuliskan tentang ketidaknyamanan di Kelayan B ini dimana sering terjadi kasus narkoba sebagaimana uraian berikut :

Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, membekuk dua pengedar sabu di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin. Penangkapan terhadap kedua pengedar sabu di kawasan Kelayan B itu dibenarkan oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Poltabes Banjarmasin Ajun Komisaris Rifai Sik, Minggu (13/9). Menurutnya, penangkapan kedua tersangka pengedar sabu itu dilakukan pada Jumat (11/9) sekitar pukul 20.30 Wita di depan Gang Gembira Kelayan B. Kedua tersangka itu berinisial Jun, 50, warga Jalan Kelayan B, Gang Gembira RT 15, dan Sai alias UP, 39, warga KS Tubun Gang Damai RT 28 No 36,

Banjarmasin.

Penangkapan kedua tersangka pengedar sabu tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Gang Gembira, Kelayan B, sering terjadi transaksi narkoba....²

Berita di atas hanyalah beberapa dari berbagai tindak kriminalitas yang terjadi di daerah Kelayan B. Sebenarnya, di daerah Banjarmasin sering ditemukan berbagai pencurian, pembunuhan, dan kriminalitas lainnya berasal dari daerah ini. Oleh karena itulah daerah ini sering disebut sebagai "Bronx" atau "Texas"-nya wilayah Banjarmasin sebagai simbolisasi sering dan tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi.

Parahnya lagi, heterogenitas masyarakat tersebut juga diiringi dengan rendahnya pendidikan masyarakat setempat. Dari informasi masyarakat setempat didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Kelayan B tidak berpendidikan atau paling-paling hanya lulus Sekolah Dasar. Sebenarnya upaya wajib belajar sembilan tahun dan program paket belajar A, B dan C sepertinya telah dilakukan namun masyarakat setempat tidak memiliki kesadaran kuat tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka sering mengabaikannya dan bahkan tak peduli. Atau mungkin saja mereka memiliki kesadaran tentang pendidikan ini namun karena desakan ekonomi dan cepatnya mobilitas hidup yang menuntut kelayakan di daerah perkotaan memaksa mereka untuk lebih mengedepankan "mencari" nafkah untuk bertahan hidup dibanding belajar.

Jika ditinjau secara rasional, memang wajar saja mereka mengutamakan aspek ekonomi dibanding aspek pendidikan dikarenakan rendahnya pendapatan yang mereka hasilkan. Informasi yang ditemukan oleh tim

¹ Diambil dari Tribun Kalteng.com

²Sumber diambil dari <http://www.mediaindonesia.com>

menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat setempat bekerja sebagai buruh bangunan, kuli di pasar, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pembuat dan penjual kue-kue tradisional seperti apam, roti pisang dan lain sebagainya yang jika dirata-rata penghasilannya per-hari adalah lima belas ribu rupiah per-kepala. Dengan kata lain, dengan pendapat seperti ini jika ingin terus bertahan hidup di kota seperti Banjarmasin maka harus diupayakan secara maksimal sehingga waktu belajar diabaikan begitu saja karena dianggap kada jadi baras (tak ada guna).

Meskipun demikian, di masyarakat ini selain memiliki kriminalitas dan kualitas hidup yang rendah, namun memiliki pula tokoh-tokoh agama (ulama) yang cukup banyak bahkan bisa dikatakan populer di sekitar Kalimantan Selatan. Sayangnya, kondisi ini sering tidak mampu menyeimbangi "kekacauan" kondisi masyarakat setempat. Dari hasil dialog tim dengan salah seorang calon dampingan setempat bisa disimpulkan bahwa meskipun para ulama setempat sering memberikan ceramah dan nasehat bahkan masyarakat setempat rajin melakukan ritual kepercayaan keagamaan namun sepertinya semua aktivitas tersebut "menguap" tanpa bekas dikarenakan tidak adanya aksi yang dianggap bisa menyelesaikan problem dasar kehidupan masyarakat setempat dan mungkin keyakinan keagamaan hanya diarahkan sebatas ritualistik formalistik belaka bahkan kadang muncul kesan bahwa ulama setempat lebih sering "keluar" wilayah untuk berceramah dibanding di lokasinya sendiri.

Akhirnya, padatnya dan heterogenitasnya masyarakat Kelayan B, ditambah dengan kualitas hidup yang rendah dari pendidikan, kesejahteraan dan pemahaman keagamaannya mengakibatkan rusaknya lingkungan setempat. Di daerah ini sangat mudah menemukan rumah-rumah kumuh, sampah-sampah yang berserakan bahkan

di sungai-sungai yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka dan masyarakat setempat lainnya.

Demikianlah gambaran singkat kondisi masyarakat Kelayan B Banjarmasin. Masyarakat miskin yang berupaya bersaing dengan kehidupan kota yang terus merongrongnya untuk berupaya bertahan hidup walaupun dalam keadaan sengsara.

D. Kondisi Masyarakat Kelayan B yang Diharapkan

Berdasarkan kondisi di atas, harapan mayoritas masyarakat setempat adalah adanya rasa aman, kesejahteraan yang layak, kesehatan yang cukup, pendidikan yang terpenuhi. Dari berbagai informasi yang didapatkan oleh tim masyarakat memang menunjukkan ekspektasi yang beragam tergantung kondisi yang mereka hadapi. Bagi masyarakat yang keamanan selama ini terancam maka keamanan adalah prioritas utama, demikian pula halnya bagi masyarakat yang tertekan oleh hutang mereka menunjukkan kesejahteraan yang utama dan begitu seterusnya.

Jika dilihat secara teoritis, semuanya seperti sebuah lingkaran setan yang saling terkait dan berkelindan. Kesejahteraan yang kurang bisa mengakibatkan pendidikan yang terbengkalai sementara ketiadaan pendidikan bisa memudahkan orang menghalalkan segala cara yang mengakibatkan kriminalitas yang meningkat dan akhirnya menghasilkan "ancaman" terhadap rasa aman. Jika ini bersifat sirkular maka satu-satunya jalan yang mungkin dilakukan adalah melakukan aktivitas solutif secara simultan atau mendiskusikan prioritas utama yang betul-betul diharapkan masyarakat.

Jika mengambil solusi simultan tentu memerlukan aktivitas besar dan dana yang tidak sedikit dan ini agaknya "tidak mungkin" dilakukan dengan pengabdian

singkat seperti ini. Adapun solusi paling dekat adalah "duduk bersama" dan *sharing* dengan masyarakat setempat tentang aksi yang mungkin paling mereka harapkan dan bisa dilakukan secara kolektif.

Saat ini yang dihasilkan adalah keinginan mereka untuk bisa hidup minimal sejahtera. Dengan kata lain, mereka ingin kebutuhan hidup sehari-hari bisa terpenuhi dengan standar mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih jauh tentang modalitas yang bisa dimanfaatkan dan bisa diaktualisasi bagi masyarakat setempat sebagai sumber lapangan kerja dan peningkat kesejahteraan hidup mereka, mungkin seperti membuat mesin daur ulang sampah yang bisa mengolah sampah yang berserakan menjadi berdaya guna kembali atau memaksimalkan majlis taklim yang dipimpin oleh ulama setempat (sebagaimana uraian di atas ulama di sini cukup banyak dan memiliki majlis taklim) yang biasanya lebih aktif ketika mengumpulkan zakat saja dan menyerahkan kepada orang-orang miskin diubah dengan pendekatan zakat produktif dengan menciptakan lahan-lahan pekerjaan untuk masyarakat setempat sehingga ulama setempat akan lebih disegani. Atau ulama merumuskan formulasi untuk memberdayakan bagi mereka yang selama ini mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup. Artinya, tidak sekadar memberdayakan miskin harta, tetapi juga miskin jiwa. Hal-hal seperti ini tentu saja masih memerlukan analisis dan diskusi lanjutan dari *preliminary research* ini.

Singkatnya, masyarakat setempat secara umum ingin *image* bahwa mereka adalah masyarakat pinggiran dan "ganas" (karena dianggap wilayah "texas" dan "bronx" Banjarmasin sebagaimana diuraikan sebelumnya) bisa hilang atau minimal berkurang di mata masyarakat lain sehingga masyarakat lain tidak canggung masuk ke wilayah mereka dan

mau membantu beban yang mereka hadapi.

E. Strategi yang dilakukan

Untuk membantu masyarakat Kelayan B tentu diperlukan beberapa tindakan strategis dan ini akan dilakukan melalui berbagai tindakan misalnya pemberdayaan masyarakat, melalui partisipasi dari berbagai pihak terutama masyarakat setempat, tokoh masyarakat, ulama pemerintah, LSM yang diperlukan dalam memaksimalkan strategi pemberdayaan dan lain sebagainya yang dianggap bisa membantu pengabdian ini. Untuk lebih detilnya aksi-aksi berikut akan dilakukan oleh tim :

1. Secara bersama-sama merumuskan prioritas problem yang ingin diselesaikan dan solusi yang mungkin dilakukan.
2. *Collective meeting* dan Analisis sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan atas kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, sekaligus akan merefleksikan kondisi sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Melalui analisa sosial ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran individu yang kemudian menjadi kesadaran kolektif untuk secara bersama-sama merencanakan sebuah aksi sosial yang bertujuan untuk peningkatan mutu hidup dan lingkungan mereka.
3. Menyusun rencana aksi dan merealisasikan aksi secara bersama-sama. Dalam proses penyusunan rencana aksi, akan dimulai dengan pemetaan masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat setempat. Dengan pemetaan masalah, diharapkan warga secara kolektif menyadari adanya hal-hal yang harus

dibenahi untuk meraih tujuan dan cita-cita. Aksi yang akan dilakukan didasarkan pada kesepakatan bersama dari seluruh pihak, sehingga peran warga secara keseluruhan dapat ikut berpartisipasi dan diharapkan dapat semakin memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara komunitas.

4. Refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi ini akan dilakukan setiap kali sebuah aksi selesai dan atau sedang dilakukan. Hal ini untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan dari harapan yang sudah terbangun sebelumnya. Dalam refleksi dan evaluasi ini sangat memungkinkan adanya perubahan strategi atau penambahan aksi. Melalui refleksi dan evaluasi ini, diharapkan akan semakin menumbuhkan sensitivitas warga atas komunitasnya dan kegiatan semacam ini akan terus dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari upaya perubahan sosial menuju peningkatan kualitas yang lebih baik. Setelah adanya refleksi dan evaluasi, akan dilakukan kembali pemetaan masalah yang ada dalam proses perubahan yang sedang mereka lakukan. Proses ini kembali dilakukan sebagai sebuah siklus yang terus berputar dan tidak akan pernah berakhir. Siklus ini diharapkan terbangun dari warga sendiri sehingga diharapkan masyarakat betul-betul berdaya dan mampu mengubah diri dan lingkungan mereka sendiri secara kolektif.

Adapun untuk melakukan tindakan di atas tim pengabdian akan melakukan langkah-langkah berikut ini:

Langkah pertama, melakukan penelitian pendahuluan (*preliminary research*) untuk menggali kondisi awal

lokasi dengan metode pengamatan langsung (*direct observation*), metode wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Dari tahap pertama ini, dihasilkan adanya pemetaan wilayah (*mapping*) dan penelusuran wilayah (*transect*) Kelayan B. Berangkat dari data awal inilah, proposal dapat disusun.

Langkah kedua, pelaksanaan strategi antara berbagai pihak dan masyarakat setempat sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dalam tahap ini, dilakukan kegiatan *collective meeting* dan analisis sosial. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan masalah dan menyusun rencana aksi dari beberapa aksi yang mungkin akan dilakukan.

Langkah ketiga, refleksi dan evaluasi aksi yang dilakukan. Dalam proses ini juga akan dilakukan monitoring yang dilakukan secara bersama-sama antara tim pengabdian dan masyarakat setempat. Dari tahap ketiga, diharapkan muncul refleksi dan pemetaan masalah yang akan melahirkan kesepakatan untuk melakukan aksi pemberdayaan kembali, sehingga proses pemberdayaan berjalan secara spiral: aksi – refleksi – aksi – refleksi dan seterusnya.

F. Pihak-pihak yang terlibat dan bentuk keterlibatannya

Dalam pengabdian ini diperlukan pihak-pihak yang bisa membantu dan berpartisipasi, yaitu:

1. Ulama, untuk memberikan pendekatan-pendekatan mental dan ruhaniah.
2. Tokoh setempat sebagai mediator dan penyampai “pesan” dari tujuan pengabdian agar tidak disalah pahami oleh masyarakat setempat.
3. Pemerintah sebagai pihak yang memungkinkan untuk merealisasikan hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi, umpamanya sarana belajar yang belum memadai.
4. LSM yang dianggap

memungkinkan untuk membantu penelitian ini.

5. Masyarakat setempat sebagai subyek dampingan.
6. Tim Peneliti yang berfungsi sebagai pendamping bagi pemberdayaan subyek dampingan.
7. Puslit IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini adalah Kelayan B, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan seperti sudah digambarkan panjang lebar dalam uraian di atas. Namun memang tidak keseluruhan wilayah Kelayan B yang menjadi lapangan penelitian, kami fokus pada Kelurahan Kelayan B Tengah yang sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Kelayan A Tengah, Kecamatan Kelayan A, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan K.S. Tubun, Kecamatan Rantauan Kecil Iir (Pekauman), sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kelayan B Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kelayan B Timur. Pemilihan Kelurahan Kelayan B Tengah ini sebagai obyek penelitian berdasarkan alasan karena ia bisa menjadi sampel keseluruhan wilayah Kelayan B bahkan dimungkinkan untuk wilayah Kelayan secara keseluruhan. Artinya, keadaan-keadaan atau masalah-masalah yang ada di keseluruhan wilayah Kelayan B ada di Kelurahan Kelayan B Tengah ini, atau dalam ungkapan lain bisa mewakili kelurahan-kelurahan lainnya yang terdapat di wilayah Kelayan B, termasuk Kelurahan B Barat dan Kelurahan B Timur.



Gambar: Diolah Lokasi Responden Bertempat Tinggal, Google Map, 2013

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan sekitar 7 bulan; yakni dimulai sejak pemetaan masalah dalam diskusi pada forum komunitas Ulama Kelayan B yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 di Majelis Pengajian Tuan Guru Qamaruddin, yang selanjutnya diikuti dengan aktivitas-aktivitas lainnya seperti *preliminary research*, pelaksanaan aksi di lapangan yang meliputi mengenal masyarakat setempat, penelusuran lapangan, bekerjasama dengan kelompok yang terbuka dan siap membantu serta kelompok lain yang seaspirasi hingga akhir kegiatan berupa membuat laporan akhir kegiatan pada bulan Oktober 2013.



Gambar: Diolah Lokasi Responden Bertempat Tinggal, Foto, 2013

2. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini termasuk model penelitian pemberdayaan, maka ia berbeda dengan model penelitian biasanya. Kalau model penelitian biasanya adalah sekadar melaporkan data yang diperoleh di lapangan sekaligus dengan hasil analisisnya, baik berupa gambaran angka-angka maupun uraian kata-kata dan sesudah itu selesai, berhenti sampai

sebatas ini saja, atau pemecahan masalah yang telah dirumuskan sebatas wacana saja. Kelanjutan penyelesaiannya silahkan orang lain untuk melakukannya, bahkan terkadang sebelum pemecahan dengan tindakan diimplementasikan, masih saja penelitian semacam ini dilakukan sebagai penelitian lanjutan yang bermaksud memperkaya data atau mempertajam analisis hasil penelitian. Baru setelah itu dijadikan bahan acuan atau landasan pijak membuat konsep-konsep dan kerja-kerja yang bersifat kebijakan, terutama bagi pemerintah.

Berbeda dengan penelitian yang diuraikan secara ringkas di atas, penelitian kami ini menggunakan pendekatan partisipatif, lazimnya disebut dengan PAR (*Participatory Action Research*). Dalam penelitian ini Tim peneliti tidak melakukan penelitian mengenai masyarakat, tetapi malah bekerja sama dengan mereka dengan bertindak sebagai fasilitator, oleh karena itu, kemampuan keterampilan manajemen dan pemahaman akan dinamika kelompok yang bagus merupakan dua hal penting yang harus dikuasai dalam hal ini. Jenis penelitian ini, sebenarnya, sangat populer di area-area seperti manajemen organisasi, pengembangan masyarakat, pendidikan dan pertanian.

Penelitian ini diawali dengan proses komunikasi dan kesepakatan antara masyarakat yang ingin mengubah sesuatu bersama-sama. Tentunya, tidak semua orang dalam suatu organisasi bersedia untuk menjadi pendamping peneliti, jadi penelitian ini cenderung dilakukan dengan sebuah kelompok kecil yang berdedikasi, terbuka, dan mau menerima ide-ide baru.

Kelompok ini kemudian bergerak melalui empat tahap: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Proses ini bisa terjadi berkali-kali sebelum semua orang senang bahwa perubahan telah dilaksanakan dengan jalan yang terbaik. Dalam penelitian ini, berbagai jenis metode penelitian dapat digunakan,

misalnya: pendiagnosisan dan evaluasi terhadap kuesioner, wawancara dan fokus group dapat digunakan untuk mengukur pendapat tentang perubahan yang diusulkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian diatas maka pengumpulan data ini dilakukan dengan dua tiga cara yakni studi pustaka, studi lapangan dan studi hasil tindakan. Perlu diketahui bahwa studi pustaka yang dimaksud bukanlah tinjauan pustaka namun suatu tindakan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang dianggap mendukung penelitian baik itu berupa dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Sumber ini bisa saja bersifat primer atau sekunder, sehingga data yang diperoleh juga bisa bersifat primer dan sekunder.

Selanjutnya, data dikumpulkan dari studi lapangan. Dalam hal ini peneliti bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (*observasi*), wawancara mendalam, diskusi kelompok (*focused group discussion*), atau terlibat langsung dalam penilaian dengan masyarakat sekitar.

Kemudian, data dari studi hasil tindakan adalah data yang diperoleh dari hasil partisipasi tim peneliti terhadap masalah yang di hadapi masyarakat. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk tim peneliti ikut serta secara langsung terhadap kegiatan masyarakat yang diperkirakan dapat memberdayakan, atau dalam bentuk tim peneliti berkolaborasi dengan kelompok agen di masyarakat yang tanpa mereka sadari sedang melakukan pemberdayaan.

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Adapun teknik analisis dan interpretasi data dilakukan dalam berbentuk verbal yakni narasi, deskripsi dan visual (foto atau gambar). Oleh karena itu, agar penelitian ini terorganisir dengan baik maka dilakukanlah tahapan-tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan data baik dari

studi pustaka maupun studi lapangan dan studi hasil tindakan.

- b. Selanjutnya data diolah sedemikian rupa dengan mengklasifikasikannya ke dalam sub-sub tema dan menyusunnya dalam bentuk yang runtut
- c. Selanjutnya, data yang telah terklasifikasi dan tersistematisasi dengan baik dianalisis dengan analisis yang telah dipilih dan ditentukan.

H. Dimensi Kemiskinan

Sebelum kita masuk kepada hasil penelitian ada baiknya diketengahkan terlebih dahulu beberapa teori untuk penelitian ini yakni teori kemiskinan, teori kota dan teori pemberdayaan yang menjadi semacam kajian pustaka sebelum terjun ke lapangan. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional, artinya kebutuhan manusia yang kompleks tercakup dalam berbagai aspek. Aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan ketrampilan. Aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber- sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran aspek lainnya. Aspek lain dari kemiskinan ini, bahwa

yang miskin ialah manusianya baik secara individual maupun kolektif.³

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Sementara itu, BKKBN mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks penyebab terjadinya kemiskinan, maka kemiskinan didefinisikan sebagai suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*proper*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan,

³ Arsyad, Lincoln. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta, 1999), h. 34.

dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.⁴

Todaro menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusia, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.⁵

Sharp dalam Mudrajad Kuncoro mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktifitas yang rendah, pada akhirnya berimplikasi pada upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan keturunan.
3. Kemiskinan muncul diakibatkan

⁴ Chambers dalam Nasikun. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2001), h. 78.

⁵ Todaro, Michael, P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid I* (Erlangga: Jakarta, 2000), h. 98.

perbedaan akses dalam modal.⁶

I. Teori dan Ukuran Kemiskinan

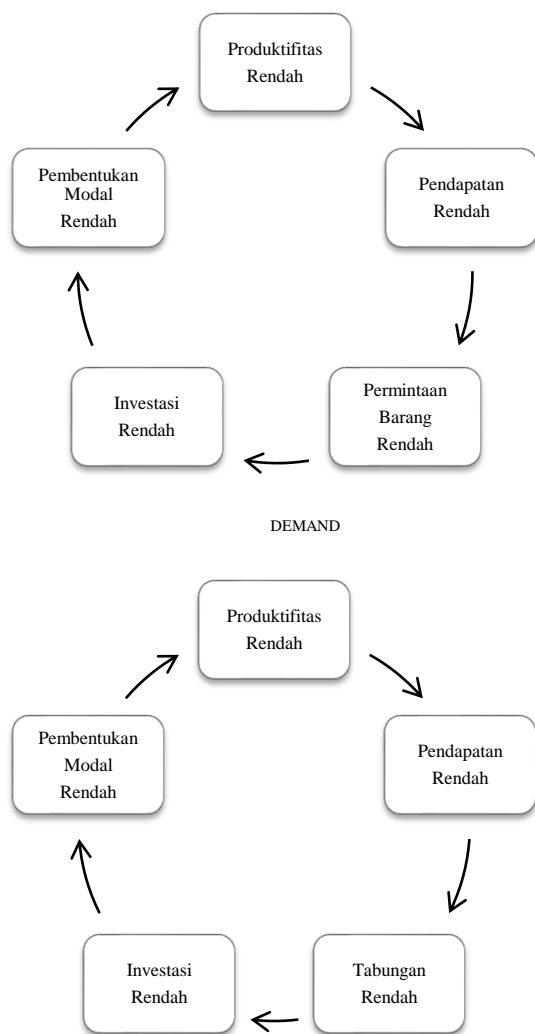
Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Ragnar Nurkse dalam Jhingan, yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi modal. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.⁷

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkat kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (*investasi*) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari sisi permintaan (*demand*), di negara-negara miskin

⁶ Sharp 1996 dalam Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), h. 72

⁷ Ragnar Nurkse dalam Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Diterjemahkan oleh D.Guritno. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010), h. 56

kemampuan untuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan tingkat produktivitasnya yang rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.



Gambar II.1 Lingkaran Kemiskinan (Vicious Circle Nurkse)

Sumber: Data telah diolah dari Jhingan⁸

Dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada

umumnya terdapat dua indikator yaitu tingkat kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedang konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relati.⁹ Dalam konteks Islam ditambah satu lagi dengan kemiskinan jiwa.

4. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dengan pendapatan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat konstan secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

Metode yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang meliputi kebutuhan papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut disebut garis kemiskinan. Menurut BPS batas garis kemiskinan kota dan desa di

⁹Tambunan, Tulus, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2001), h. 56

⁸ *Ibid*, h. 87

Indonesia untuk tahun 2010 adalah 211.726 rupiah.

5. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasar pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.

BKKBN menggunakan ukuran kemiskinan relatif ini dan mendefinisikannya dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

6. Kemiskinan Jiwa

Kemiskinan jiwa dimaksud adalah di samping mereka miskin harta mereka juga miskin jiwanya dari nilai-nilai ruhaniah yang bersumber dari agama Islam. Orang yang miskin harta, namun kaya hati tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, budaya dan susila karena ia tidak mau mengotori harkat, derajat dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya, orang miskin jiwa, walaupun kaya harta seringkali melakukan pelanggaran hukum, merusak lingkungan, tidak beradab, tak punya susila dan perilaku rendah lainnya. Apalagi sudah miskin harta, miskin jiwa pula, dapat dipastikan akan lebih parah

lagi situasi kemanusiaannya yang berpengaruh pada perilaku kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan penelitian tentang kemiskinan nasional, May dkk menemukan percampuran antara tiga pendekatan yang lazim digunakan:¹⁰

- a. Kemiskinan yang dipahami sebagai ketidak mampuan untuk memperoleh standar minimal penghasilan yang tercermin oleh indikator kemiskinan yang dapat dihitung dan bersifat mutlak. Pengukuran kebutuhan diukur secara kuantitatif dan mengandalkan survei-survei tentang pendapatan dan konsumsi.
- b. Kemiskinan yang dipahami sebagai kurangnya sumberdaya untuk memperoleh jenis diet atau gaya hidup yang dapat diterima secara sosial. Pendekatan ini menekankan pada indikator relatif yang bervariasi menurut standar masyarakat yang akan diukur, dan mungkin juga mempertimbangkan masalah distribusi. Pengukuran biasanya kuantitatif, walaupun pendekatan yang seringkali subyektif atau kualitatif mungkin memainkan peran dalam menetapkan definisi dan standar kemiskinan.
- c. Kemiskinan yang dipahami sebagai ketidak mampuan untuk melakukan pilihan-pilihan, ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan, dan pengucilan sosial.

¹⁰ May, C.R., Puffer, S.M., and Mc-Carthy, D.J., "Transferring Management Knowledge to Russia: A Culturally-based Approach". *Academy of Management Executive*. May. Vol 19:2. (akademik.nommensen-id.org/portal/public_html/JURNAL/)

Pengukurannya merupakan hal yang rumit, dan tidak ada pendekatan yang diterima secara umum yang digunakan walaupun lembaga seperti UNDP telah memulai meneliti metodologi alternatif. Teknik penelitian kualitatif dan partisipatif seringkali memainkan peranan inti.

J. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kuncoro menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota.¹¹ Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.¹²

Penggunaan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa menandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB berlaku secara menyeluruh. Sementara PDRB per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan,¹³ yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), h. 79

¹² Lincoln Arsyad, *Op. Cit.*, h. 89

¹³ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 87.

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara meniai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Rahardjo Adisasmita berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:¹⁴

a. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula

peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

b. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungannya PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

c. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik).

Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu.

3. Pengangguran

Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. Ketidadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.¹⁵

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran

¹⁴ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 98.

¹⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004), h. 77

adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.¹⁶ Sedangkan menurut BPS pengangguran adalah sejumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.¹⁷

Sadono Sukirno, membedakan pengangguran kedalam beberapa jenis, yaitu:¹⁸

a. Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

1) Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

2) Pengangguran Friksional

Jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah:

a) Perkembangan

teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi barang-barang kuno menurun dan akhirnya tutup sehingga pekerja di industri ini menganggur.

b) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Pesaing dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan barang lokal menurun. Industri lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran.

c) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan pesat dikawasan lain.

4) Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

b. Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ BPS, 2008

¹⁸ Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, h. 83

lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja, akibat banyaknya tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. Sehingga apabila sejumlah besar dari mereka berpindah sektor pekerjaan, hasil sektor pekerjaan yang ditinggalkannya tidak akan berkurang walaupun tidak diadakan penggantian modal yang berarti.

3) Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

4) Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut BPS, di Indonesia jam kerja normal

adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur.

K. Teori Perkotaan

Umum diketahui bahwa dalam suatu wilayah terdapat tempat-tempat dimana penduduk atau kegiatan terkonsentrasi dan terdapat pula tempat yang kurang terkonsentrasi. Tempat terkonsentrasinya penduduk dan kegiatannya dinamakan dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, atau daerah modal. Masing-masing istilah itu bergantung dengan asosiasi pikiran masing-masing individu tentang fungsi apa yang hendak ditonjolkan atas tempat-tempat konsentrasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasional, yang dimaksudkan dengan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan-kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya satu juta jiwa. Kawasan mega politan ialah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Dalam menetapkan apakah suatu konsentrasi pemukiman sudah dapat

dikategorikan sebagai suatu kota atau belum, perlu ada kriteria yang jelas untuk membedakannya. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pelaksanaan survei status desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun 2000, menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan apakah suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai desa atau sebagai kota. Kriteria yang digunakan adalah; (1) kepadatan penduduk per km², (2) persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya pertanian atau nonpertanian, (3) persentase rumah tangga yang memiliki telepon, (4) persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik, (5) fasilitas umum yang ada, seperti: fasilitas pendidikan, pasar, tempat hiburan, kompleks pertokoan, dan fasilitas lain seperti hotel, bilyar, diskotik, karaoke, panti pijat, dan salon.

Kriteria BPS hanya berdasarkan atas kondisi (besaran) fisik dan tidak dilengkapi dengan melihat apakah tempat konsentrasi itu menjalankan fungsi perkotaan. Tarigan berpendapat untuk melihat apakah suatu konsentrasi digolongkan sebagai kota atau tidak, adalah dari seberapa banyak fasilitas perkotaan yang tersedia dan seberapa jauh kota itu menjalankan fungsi perkotaan.¹⁹ Fasilitas atau fungsi perkotaan antara lain adalah:

1. Pusat perdagangan, yang tingkatan yang dapat dibedakan atas melayani kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran, melayani beberapa kota kecil, melayani pusat provinsi atau pusat perdagangan antar pulau/ekspor di provinsi tersebut dan pusat perdagangan beberapa provinsi sekaligus.
2. Pusat pelayanan jasa, baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan.

3. Tersedianya prasarana perkotaan, seperti sistem jalan kotayang baik, jaringan listrik, jaringan telepon, air minum, pelayanann sampah, drainase, taman kota, dan pasar.
4. Pusat penyedia fasilitas sosial seperti prasarana pendidikan.
5. Pusat pemerintahan, banyak kota yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan.
6. Pusat komunikasi dan pangkalan transportasi, artinya dari kota tersebut masyarakatdapat berhubungan ke banyak tujuan dengan banyak pilihan alat penghubung.
7. Lokasi pemukiman yang tertata, suatu lokasi dikatakan kota karena penduduknya yang banyak dan lokasi pemukiman yang teratur dan tertata. Terdapat beberapa definisi kota yang dipandang dari berbagai aspek.

Secara administratif, kota didefinisikan sebagai wilayah kewenangan dengan batas wilayah administrasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan. Dari aspek fungsional kota diartikan sebagai pemusatan beberapa kegiatan fungsional, dengan penekanan pada fungsi jasa koneksi, distribusi, dan produksi non pertanian, oleh karenanya pasar dan jasa perangkutan menjadi ciri utama suatu kota. Sosial ekonomi, kota merupakan konsentrasi penduduk dengan dominasi kegiatan usaha di sektor non pertanian yang heterogen. Dari sisi sosial budaya, kota merupakan pusat perubahan budaya yang dapat mempengaruhi pola nilai budaya yang ada. Secara fisik, kota merupakan suatu lingkungan terbangun (*built up area/enviroment*) yang didominasi oleh struktur fisik binaan bukan alami. Secara geografis, kota merupakan pemusatan penduduk dan kegiatan usaha yang secara geografis akan menempatkan dirinya pada lokasi yang strategis secara ekonomi, sosial, maupun

¹⁹ Robinson Tarigan, *Op. Cit.*, h. 89

fisik. Dari aspek demografis, kota adalah tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk yang besarnya ditentukan berdasarkan batasan statistik tertentu. Secara umum, kota (*city*) adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota-kota. Sedangkan perkotaan (*urban area*), ialah kawasan dengan kepadatan populasi yang tinggi yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan kota.²⁰

Penelitian World Bank menentukan daerah-daerah metropolitan, dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Uchida dan Nelson, dimodifikasi untuk penerapan dengan konteks kewilayahan Indonesia.²¹ Ukuran aglomerasi berbasis urbanisasi menggunakan tiga faktor untuk menentukan daerah perkotaan: ukuran sebuah pusat perkotaan, kepadatan penduduk, dan jarak dari kabupaten ke pusat kota. Langkah-langkah ini membentuk dasar bagi Agglomeration Index (AI) yang pada dasarnya adalah perkiraan wilayah metropolitan baik kota dan kabupaten pinggiran kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan dekat dengan pusat kota (berdasarkan waktu Komuter).

Metode Uchida dan Nelson merupakan suatu pembuktian yang bagus. Walaupun demikian, metode tersebut disusun untuk konteks secara internasional, sehingga diperlukan penyesuaian untuk kondisi di Indonesia. Modifikasi tersebut antara lain: (1) Populasi minimum dengan kepadatan 710 orang per kilometer persegi untuk Jawa-Bali dan kepadatan 150 orang per kilometer persegi untuk daerah lainnya.

²⁰ Hendarto, Kusumarsono, *Belajar Trading*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 68

²¹ Penelitian World Bank (2012) dalam Uchida dan Nelson (2008)

(2) Maksimum waktu tempuh perjalanan dari pusat kota 90 menit untuk Jakarta dan Surabaya, dan 60 menit untuk kota lainnya. Dengan menggunakan data BPS tahun 2007, telah teridentifikasi 44 aglomerasi dengan beberapa diantaranya terdiri dari satu kota dan beberapa dengan satu atau lebih kota inti multi-distrik wilayah metropolitan.

Banjarmasin termasuk kategori sebagai kota besar, sebagaimana teori kota yang telah diuraikan di atas, walaupun belum mencapai tingkat kota Metropolitan, apalagi sampai kota Megapolitan, tetapi mungkin dalam beberapa tahun lagi menuju ke sana dengan segenap modalitas sosial, budaya, ekonomi dan politik yang dimilikinya. Kota Banjarmasin merupakan ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang cukup padat ini sekali lagi termasuk salah satu kota besar di Indonesia. Banjarmasin dijuluki kota seribu sungai, kota ini merupakan sebuah kota kepulauan sebab terdiri dari sedikitnya 25 buah pulau kecil (delta) yang merupakan bagian-bagian kota yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain

Sejak zaman dulu hingga sekarang Banjarmasin masih menjadi bandar pelabuhan terpenting di pulau Kalimantan. Pelabuhan kota Banjarmasin adalah pelabuhan Trisakti yang terletak 12,5 mil dari muara sungai Barito⁶⁴. Pelabuhan Trisakti memiliki Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB) yang termasuk 10 besar terminal petikemas di Indonesia.²²

Kota Banjarmasin dibelah oleh Sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu

22

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin - cite_note-11

prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: Utara Sungai Alalak (seberangnya kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Selatan Kabupaten Banjar (kecamatan Tatah Makmur, sebelah barat adalah sungai Barito (seberangnya kecamatan Tamban, kabupaten Barito Kuala, sebelah timur Kabupaten Banjar (kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar).²³

Penataan kota Banjarmasin semestinya penataan daratan harus mengikuti penataan sungai, artinya penataan sungai yang didahulukan baru penataan daratan.²⁴ Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yaitu: Banjar Barat: 13,37km²; Banjar Selatan: 20,18 km²; Banjarmasin Tengah: 11,66 km²; Banjar Timur: 11,54 km²; Banjar Utara: 15,25 km². Penduduk Kota Banjarmasin ada 627.218. Rincian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin
menurut Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Pendudukan (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Banjarmasin Selatan	20,18	150.221	7.444
Banjarmasin Timur	11,54	118.278	10.249
Banjarmasin Barat	13,37	149.753	11.201
Banjarmasin Tengah	11,66	114.584	9.827
Banjarmasin Utara	15,25	94.409	6.209
Kota Banjarmasin	72	627.245	

Sumber data: Diolah BPS 2013

L. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan masyarakat

²³ Angka Sementara Sensus Penduduk 2010 BPS.

²⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin - cite_note-10

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*".²⁵ Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Pemikiran ini pada periode akhir-akhir banyak di kembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep- konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and inter-generational equity*". Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna ke berdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sumber keberdayaan masyarakat secara fisik (sehat fisik dan mental, terdidik, kuat serta inovatif) dan nilai-nilai intrinsik (nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan).²⁶

²⁵ Chambers Robert., *Pembangunan Desa (Mulai dari belakang)*. (Jakarta: LP3ES,1995), h. 134

²⁶ Pidato Ginandjar Kartasasmita, sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas yang disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997 dengan topik Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat.

Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi (participatory), jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (equality) yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harakah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan publik (*public policies*) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggungjawab adalah

bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.²⁷

Pemberdayaan juga mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah disebabkan kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Mengutip pernyataan Margono dalam proseding pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani di IPB, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan kondisi

²⁷Freidmeann, *Empowerment (The Politics of Alternative Development)*, (Blackwell Publishers Three Cambridge Center: USA, 1993). Menyebutkan bahwa The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, lokal self-reliance (but not autarchy), direct participatory) democracy, and experiential sosial learning.

dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan bahwa perkembangan itu adalah hasil kekuatan eskternal, masyarakat harus dijadikan subyek bukan obyek.²⁸ Sedangkan menurut Vidhyandika Moeljarto Pemberdayaan masyarakat banyak ditentukan oleh akses dan kontrol yang dimiliki subyek pembangunan itu pada berbagai sumber daya. Sumberdaya pembangunan yang utama adalah modal, termasuk didalamnya kepintaran, ketrampilan, informasi dan teknologi di samping dana dan tanah.²⁹

Selanjutnya A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari “upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah, negara dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.³⁰

Merujuk pada berbagai konsepsi di atas, maka pemberdayaan merupakan

suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi (*participatory*), jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (*equality*) yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian dari masyarakat yang selama ini tidak berdaya.

Mengacu dari beberapa pendapat para pakar sebagaimana dijelaskan di atas, maka konteks pemberdayaan mencakup :

1. Perubahan sikap; masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normatif;
2. Peningkatan partisipasi sosial; Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan diberi kesempatan turut berpartisipasi, bukan hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situasi yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin;
3. Solidaritas sosial; pemberdayaan sosial mampu menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama;
4. Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga, khususnya warga miskin;
5. Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan

²⁸ Margono Slamet, *Memantapkan Posisi dan meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*, (Bogor: Pustaka Wira Usaha Muda. 2000), h. 123

²⁹ Vidhyandika Moeljarto, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program Inpres Desa Tertinggal*. (Jakarta Centre For Strategic And International Studies, 2000), h. 154

³⁰ Pranarka, A.M.W. & Moelyarto, Vindyandika, , *Pemberdayaan (Empowerment) pemberdayaan, konsep, dan implimentasi*, (Jakarta, Centre for strategic and International studies (CSIS), 1996), h. 95

kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin;

6. Perubahan orientasi nilai budaya; dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah. Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.
7. Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Teori-teori ekonomi makro umumnya berpedoman pada peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan pra anggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, namun dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan. Menurut Brown kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan pasar dan menimbulkan kesenjangan.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada

lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok yaitu :

- a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptabel*);
- b. Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountabel*);
- c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*protabel*);
- d. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); dan
- e. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu.

Mencermati uraian tersebut di atas, maka pendekatan kelompok dianggap efektif. Dalam, penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Terjalannya kemitraan usaha antara kelompok dapat mengembangkan usaha, memudahkan

pemasaran hasil produk sehingga mampu bersaing.

Dari kemampuan yang di miliki obyek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya obyek akan beralih fungsi menjadi subyek yang baru. Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subyek disebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif obyek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok (kolektif). Puji Hadiyanti mengutip pendapat Freidmean bahwa proses wujud perubahan sosial atau status hirarkhi yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, akan meningkatkan kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.³¹ Di dalam kelompok terjadi suatu dialogical encounter yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Diantara anggota kelompok dapat mengenali kepentingan bersama sehingga dapat menumbuhkan identitas seragam.

Dalam pendekatannya, pemberdayaan memiliki dua aspek penting, yaitu partisipatif dan desentralisasi. Aspek partisipatif melibatkan masyarakat, khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pemanfaatan hasil. Sedangkan aspek desentralisasi mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan perencanaan dan pelaksana

³¹ Puji Hadiyanti, *Kemiskinan Dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 2, Nomor 1, Juni 2006.

pembangunan kepada pemerintah desa yang terdekat dengan penduduk miskin.

Penduduk miskinlah yang paling mengetahui usaha yang dapat mereka lakukan dan kebutuhan mana yang paling mendesak. Di samping itu pembentukan kelompok merupakan fase awal pemberdayaan Artinya masyarakat miskin diberi kebebasan untuk membentuk dan menuangkan kreatifitasnya dalam kelompok yang diinginkan. Pembentukan kelompok menekankan pada prinsip kebersamaan demi mewujudkan semangat dan kegiatan kooperatif.

Dalam kebersamaan, tiap-tiap anggota ikut bertanggung jawab, saling mempercayai dan saling melayani. kelompok dapat juga dipakai sebagai alat bagi para anggota untuk mengembangkan aspirasi dan potensi mereka. Pembentukan kelompok menyediakan Suatu dasar (platform) bagi terciptanya kohesi sosial anggota kelompok. Kohesi sosial akan terbentuk setelah diadakannya pertemuan rutin untuk membahas aktivitas kelompok dan permasalahannya. Adanya kedekatan dan mutual interest dari anggota kelompok membantu kelompok untuk membentuk semangat sukarela. Kondisi ini akan membantu kelompok untuk mengurangi kerentanan individu dalam menghadapi goncangan yang mendadak dan kesengsaraan. Akibat sinergistik dari ikatan kelompok ini nantinya akan membantu mengatasi masalah mereka.

Menurut Puji Hidayanti sudah banyak bukti bahwa pemberdayaan melalui kelompok swadaya di pedesaan hanya sebatas slogan dan jargon yang di paksakan, bahkan terkesan hanya untuk memenuhi target pembangunan dan yang seringkali terjadi adalah pemerataan bentuk-bentuk program yang seragam, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang keberadaannya beragam dimana bukan merupakan kebutuhan masyarakat setempat.³² Idealnya suatu kelompok

³² *Ibid*, Puji Hidayanti, mengemukakan bahwa: pembentukan karakter kelompok yang

adalah terbentuknya solidaritas kelompok yang secara bersama-sama mencapai suatu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keberadaan kelompok di masyarakat dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat asalkan ditangani secara profesional.³³

Menurut Puji Hadiyahanti pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama, memerlukan arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan guna menunjang eksistensi kelompok yaitu suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat,³⁴ yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Proses transformasi ini harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Ditambahkan pula bahwa kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilah menjadi 3 yaitu :

Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung

mengikat seperti sistem interaksi, norma, kontinuitas, identitas sosial dan motif atau tujuan yang sama mengalami kegagalan. Akibatnya kelompok tersebut hanya berfungsi sebagai kumpulan orang-orang tanpa ikatan yang diperalat oleh orang yang mempunyai kepentingan pribadi dan daya yang lebih kuat.

³³ *Ibid.*, Puji Hadiyahanti mengemukakan program-program yang bergulir memang merupakan prioritas kebutuhan dari masing-masing anggota kelompok dengan tidak mengabaikan kepentingan individu dan mempertimbangkan kesesuaian potensi, kondisi, dan permasalahan yang terdapat di masing-masing daerah.

³⁴ *Ibid.*, Puji Hadiyahanti mengemukakan Perubahan struktur yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah. Proses ini diarahkan agar setiap upaya penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat.

mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.

Kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan ekonomi kelompok sasaran. Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.³⁵

Ketiga, kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat.

³⁵ Pendekatan pengembangan ekonomi rakyat yang paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Upaya peningkatan kemampuan harus menghasilkan nilai tambah setidaknya-tidaknya diadakan perbaikan akses, yaitu (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien, (3) akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus menerus; dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam program penanganan kemiskinan harus dilaksanakan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan misi pemberdayaan suatu program pemberdayaan masyarakat antara lain :

Pertama, *Penyadaran*.

Penyadaran berlangsung dalam proses pengenalan diri akan potensi diri dan lingkungan sebagai kekuatan yang dapat digerakkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam konteks sosio-budaya dan struktur sosial. Penyadaran akan kemampuan diri, sumber daya yang mereka miliki, peluang baru yang bersumber dari dalam dan luar komunitas untuk memperbaiki kondisi, dan arti solidaritas antar warga dalam memenuhi kebutuhan merupakan misi pendampingan yang utama.

Kedua, *Pengorganisasian*.

Penguatan organisasi masyarakat mutlak diperlukan dalam upaya memberdayakan diri mereka, mengacu pada prinsip memanfaatkan potensi kelembagaan yang berakar kuat dalam struktur masyarakat lokal.

Ketiga, *Kaderisasi*. Setiap program pada hakekatnya memiliki keharusan mempersiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas pendampingan setelah program berakhir.

Keempat, *Dukungan*

Teknis. Pembaharuan masyarakat setempat umumnya memerlukan bantuan suatu lembaga dari luar yang menguasai sumber daya informasi dan teknologi yang dapat membantu mempercepat pembaharuan itu menjadi kenyataan. Organisasi pendukung

teknis adalah aparat pemerintah, mungkin juga perusahaan swasta.

Kelima, Pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem mempunyai sejumlah peranan penting: Koordinasi diperlukan dalam penjadwalan tahapan kegiatan, yaitu menyangkut fungsi penyadaran, pelatihan, pengorganisasian dan penyediaan sumberdaya pendukung.

M. Pemetaan Masalah (*Problem Mapping*)

Dalam seminar pendahuluan sebelum betul-betul terjun ke lapangan, kami memperoleh masukan yang berharga dan penting untuk tidak saja melihat kemiskinan secara ekonomi-materiil, tetapi juga kemiskinan dalam pengertian jiwa dan spiritual. Masukan ini, menjadi modal dasar kami untuk mempertimbangkan penelitian kami mengarah ke sana. Meskipun waktu itu, pada mulanya belum ada keinginan kuat karena harus menunggu proses selanjutnya yang masih panjang.

Kemudian, kami terjun ke lapangan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini, tidak sekali kami lakukan, tetapi berkali-kali untuk memperoleh data awal yang mendekati hampir sempurna. Kami berkeliling mengamati lingkungan, baik lingkungan sungai, lingkungan perumahan, lingkungan gang-gang, lingkungan sekolah dan lingkungan tempat ibadah dan lain-lain. Kami juga wawancara dengan berbagai tokoh, seperti tuan guru (ulama), lurah, tatusa (sesepuh) dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk kaum perempuan. Demikian pula, kami mencatat atau mendokumentasi beberapa dokumen yang ada di kelurahan yang berkaitan dengan jumlah penduduk, jumlah sekolah, jumlah tempat ibadah, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan dan lain-lain.

Dari survey beberapa kali ke lapangan ini, kami rancang semacam pedoman mentah atau masih perlu proses pematangan untuk dibawa ke masyarakat sendiri yang berkepentingan. Diharapkan nanti, kami bersama-sama masyarakat dapat melakukan pematangan dengan beberapa kali melakukan semacam diskusi fokus group dengan berbagai kalangan baik elit agama maupun elit birokrasi kelurahan dan elit masyarakat lainnya. Dari hasil-hasil diskusi fokus group, kami mengharap menemukan problem-problem penting yang bisa dijadikan prioritas untuk ditangani dan kalau bisa sampai diselesaikan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Hasil dari beberapa kali diskusi fokus group ditemukan beberapa masalah krusial yang menjadi perhatian dan berikutnya dipertimbangkan untuk dicarikan cara penyelesaiannya. Masalah tersebut adalah pendidikan, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, kriminalitas dan kemiskinan yang sebenarnya satu sama lain saling terkait dan nyaris tak bisa dipisahkan karena sudah menjadi semacam lingkaran rantai yang terangkai dalam kesatuan. Kami kemudian sekali lagi berdiskusi dengan masyarakat untuk menentukan masalah yang menjadi prioritas. Dari hasil proses diskusi terakhir ini yang berlangsung cukup panjang dan sengit, dipilihlah masalah kriminalitas sebagai prioritas. Pilihan ini berdasarkan alasan bahwa jika bisa dihilangkan atau setidaknya dikurangi tingkat kriminalitas, maka kenyamanan berusaha akan tercipta karena lingkungan menjadi kondusif, hilang rasa was-was dan ketakutan. Keberhasilan usaha, sudah barang tentu secara perlahan dan bertahap membuat masyarakat mulai sejahtera serta mulai teratasi masalah kemiskinan, karena sudah terpenuhi kebutuhan dasar mereka yakni sandang, pangan dan papan. Kemudian, ketika sudah sejahtera, jelas masyarakat ingin mereguk dunia pendidikan sebanyak-banyaknya dan setinggi-

tingginya untuk semakin meningkatkan taraf hidup yang didambakan. Selanjutnya, ketika masyarakat sudah terdidik, dapat dipastikan mereka akan memperjuangkan untuk memperoleh kesehatan yang layak.



Gambar II.2 : Diolah, Salah satu kerawanan karena lingkungan yang kumuh

Ringkas kata dengan penyelesaian atau pengurangan masalah kriminalitas, maka masalah yang lainnya akan terselesaikan dan berkurang pula, meskipun memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan.

Komunitas penduduk Kelayan B bila dilihat dari pekerjaan yang terbanyak adalah buruh dengan jumlah jiwa 2671 dan menengah adalah guru 31 orang, PNS 33, TNI/POLRI 49, pedagang 61 orang. Sedangkan jenis pekerjaan yang terendah adalah bidan 2 orang, tukang cukur 2 dan dukun bayi 1 orang.

Ketika kami sudah mulai terjun ke lapangan, kami menemukan seorang tuan guru muda yang mempunyai majelis

pengajian. Tuan guru muda tersebut adalah H. Qamaruddin putra dari pasangan H. Johansyah dan Hj Umi yang masih berumur 37 tahun. Ia dari latar belakang keluarga yang kuat agamanya, berasal dari daerah Negara. Ia masih ada hubungan kekeluargaan dengan tuan guru H. Adnani Iskandar (almarhum) yang sangat menguasai berbagai cabang keilmuan Islam khususnya Fiqih. Bisa diperkirakan ia sejak kecil sudah dididik orang tuanya dengan pendidikan agama yang cukup dalam. Kemudian ia sempat menjadi santri pondok pesantren Al-Falah, Banjarbaru dan Darussalam, Martapura selama beberapa tahun. Selama mondok ia tidak semata-mata menuntut ilmu di dalam pondok, tetapi juga di luar pondok kepada tuan-tuan guru kenamaan sekitar pondok yang membuka pengajian bidang ilmu spesifik, terutama seputar pondok Darussalam.



Gambar III.3: Diolah, Guru H. Qamaruddin memberikan tausiah agama dan kehidupan keduniaan

N. Kegiatan Keagamaan yang Memberdayakan Komunitas Miskin

Tuan guru Qamaruddin dikenal sebagai sedikit dari banyak tuan guru yang berani tinggal di daerah Kelayan yang menakutkan, bahkan ia bertekad untuk tidak pindah ke tempat lain karena demikian cintanya ia kepada masyarakat Kelayan. Padahal, banyak tuan guru lain yang setelah beberapa waktu bermukim di sini, kemudian pindah ke wilayah-wilayah baru yang menjanjikan tanpa melihat apakah dakwah yang mereka lakukan selama ini sudah berhasil sehingga menyisakan kenangan manis setelah ditinggalkan.

Adapun yang menarik dari tuan guru Qamaruddin ini bagi kami adalah penanganannya di majelis terhadap para preman yang selama ini dianggap sebagai biang keladi kriminalitas. Rupa-rupanya preman-preman ini menjadi jinak dan mau bertaubat ketika berada dalam didikan dan binaannya. Ia tidak menyadari bahwa kerja yang dilakukannya selama ini adalah bagian dari pemberdayaan yang menjadi konsen utama dari metode penelitian kami ini.

Melihat ini, kami seolah-olah menemukan pucuk dicinta ulam tiba, kami dengan tuan guru Qamaruddin punya visi dan misi yang sama dan aksinyapun bisa dipastikan mampu berjalan bersama-sama. Segera kami melakukan kolaborasi dengan tuan guru Qamaruddin. Apa yang sudah dilakukan tuan guru Qamaruddin terutama pemberdayaan agama untuk penyadaran komunitas preman kami support baik berupa dukungan moral, bantuan pikiran, maupun dana, walaupun mungkin tidak seberapa.

Dalam menginsafkan preman tuan guru Qamaruddin tidak langsung pada doktrin fiqih, tetapi mendahulukan doktrin akhlak. Ia memprogramkan pemberdayaan agama kepada mereka dengan cara-cara santun dan humanis, karena memang pengajaran akhlak harus dicontohkan sendiri oleh sang da'i. Sebelum mengajarkan akhlak, ia menempatkan terlebih dahulu posisi mereka sebagai manusia juga yang bisa khilaf dan bisa benar sebagaimana dirinya. Ternyata mereka banyak yang tersentuh perasaan keagamaannya ketika sang Tuan Guru memperlakukan mereka secara santun dan manusiawi ini. Ia melakukan ini karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan (al-musawah) yang berarti tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak yang lain. Tidak boleh ada dominasi sosial dalam komunitas karena hanya adanya perbedaan strata sosial atau perbedaan kasta. Penguasa dan pemimpin dalam Islam tidak dibenarkan

memaksakan kehendak terhadap bawahannya termasuk berlaku zalim dan menindas. Kesetaraan telah menjadi dasar atau prinsip Islam dalam sistem hubungan antar individu. Selain itu, kesetaraan juga menjadi landasan dalam semua segi pergaulan sosial, seperti dalam hak-hak sosial, pertanggung-jawaban dan sanksi, serta hak-hak umum seperti hak pendidikan, ekonomi, hukum dan lain-lain.

Berbarengan dengan ajaran kesetaraan, ia ajarkan pula ajaran kedamaian, karena dari pengertian Islam itu sendiri yang berasal dari akar kata salam berarti kedamaian. Islam adalah agama damai dan menganjurkan umatnya untuk menebarkan kedamaian sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw :”*Afsus salam*, artinya sebarkanlah kedamaian kepada yang kalian kenal atau tidak kalian kenal, kapan saja dan di manapun kalian berada ketika saling bertemu satu sama lain, baik saat berpapasan maupun dalam majelis pertemuan, entah di rumah, masjid, kantor ataupun di jalan. Hal ini diisyaratkan pula secara simbolis dalam rukun sembahyang yang terakhir yakni prilaku salam kekiri dan kekanan adalah perjanjian untuk menebarkan kedamaian kepada orang atau makhluk sekitar kita dengan penuh keikhlasan. Perjanjian menebar kedamaian ini dikukuhkan lagi *waminkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhillnal jannata daras salam*, artinya Ya Allah Engkau Maha Damai, dari-Mu dengan kedamaian dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang damai”. Jadi, jika hati sudah bersemayam rasa damai, maka akan melahirkan kepribadian individu-individu yang senang menebarkan kedamaian dan pada akhirnya akan membuat suasana damai di bumi alias damai di hati damai di bumi. Dengan demikian, amarah, dendam kesumat, permusuhan dan peperangan sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran

Islam bahkan sebagai akhlak *mazmumah* (kepribadian tercela).



Gambar III.4: Diolah, Pengajian diselenggarakan di Majelis "Darul Madinah"

Seiring dengan itu ia ajarkan pula, ajaran kasih sayang dari Islam yang juga termasuk ajaran pokok dan prinsipil, karena Allah maha *Rahman* dan maha *Rahim*. *Al-Rahman* dan *al-Rahim* adalah kata benda dari *wazan* yang berlainan, yang menyatakan arti yang berdekatan. *Al-Rahman* berasal dari *wazan fa'lan* untuk menunjukkan jenis kasih sayang yang teramat besar, sedangkan *al-Rahim* berasal dari *wazan fa'il* untuk menyatakan kasih sayang tak putus-putusnya. Kita disuruh Nabi Muhammad Saw untuk memulai perbuatan yang baik dengan membaca basmalah yakni *bismillahirrahmanirrahim*, artinya dengan nama Allah yang maha Pengasih tak pilih kasih, maha Penyayang tak pandang sayang. Hal itu mengisyaratkan kita untuk mewarisi sifat *rahman-rahim* menjadi kepribadian kita sehari-hari, jauh dari rasa benci dan sikap keras serta ketidakramahan. Lebih dari itu, Nabi Muhammad Saw menegaskan man la yarham la

yarham, artinya siapa yang tidak berkasih-sayang, maka tidak akan dikasih-sayangi. Dalam ungkapan sebaliknya siapa yang berkasih-sayang, maka ia akan dikasih-sayangi. Apalagi Nabi Muhammad Saw ditegaskan Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam (*wama arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin*, artinya tak Ku-utus engkau Muhammad kecuali untuk kasih sayang bagi sekalian alam). Artinya kasih sayang dalam ajaran Islam tidak kepada kasih sayang kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk lainnya. Nabi Muhammad Saw menegaskan lagi barang siapa mengasih-sayangi makhluk yang ada di bumi, maka akan dikasih-sayangi oleh makhluk yang ada di langit termasuk dikasih-sayangi oleh yang empunya langit dan bumi yakni Allah Swt yang maha Pengasih lagi maha Penyayang.

Tiga rangkaian ajaran akhlak terpuji (kesetaraan, kedamaian, dan kasih sayang), tuan guru H. Qamaruddin sampaikan dengan cara bijaksana dengan kadar kemampuan berpikir komunitas preman, alias ia menyesuaikan bahasa ceramahnya atau pengajiannya sesuai dengan tingkat bahasa yang mudah dipahami pendengarnya. Kemudian ia petik ajaran-ajaran tersebut dan dijelmakan dalam bentuk butir-butir nasehat yang baik, tidak menekan dan tak terkesan menggurui, tetapi dengan sikap sangat ramah dan santun. Selanjutnya, ia ajak mereka untuk berdialog dengan cara-cara yang anggun entah dengan lontaran pertanyaan yang tidak jelas, lalu dijawab dengan keterangan yang jelas, atau menanggapi atas sanggahan dengan uraian-uraian yang mudah dipahami atau mencari jawaban bersama atas suatu tanya yang tak terjawab.

Setelah itu ketika dirasa selesai, baru ia melanjutkan pelajaran dengan mengajarkan mereka berbagai bacaan *dzikrullah*, mengamalkan salawat dan kalimat-kalimat *toyyibah* yang diwiridkan secara konsisten (*istiqamah*) sehingga

mereka mempunyai kesibukan yang bernuansa ruhaniah, tidak semata-mata sibuk dengan urusan dunia seperti selama ini mereka alami. Bacaan-bacaan ini, biasanya bisa mempertajam rasa, menjernihkan pikiran dan membeningkan hati sehingga membuat mereka merasa tenang jiwa raganya, tidak merasa gelisah lagi. Diajaknya mereka ke dalam majelis-majelis dzikir secara kolektif, di samping amalan-amalan individual yang sudah ditetapkan. Diajaknya juga mereka menghadiri acara-acara maulid Nabi Muhammad saw yang banyak dikumandangkan bahkan ditembangkan berpuluh-puluh jenis salawat. Tidak sampai di situ, mereka juga diajaknya menghadiri setiap acara-acara hari besar Islam (Tahun Baru Islam, Nisfu Sya'ban, Isra' Mi'raj dan lain-lain), baarwahan (peringatan hari kematian) dan selamatan (tasmiyah, saruan haji, saruan mandirikan rumah, saruan agar selamat dan lain-lain).

Secara perlahan-lahan mengajak mereka secara bersama-sama untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya, yakni bukan saja, banyak membaca *istighfar* tetapi juga menyesali kesalahan yang sudah terjadi dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan jahat dan maksiat yang selama ini mereka lakukan. *Istighfar* ia ajarkan tidak semata-mata sebagai bacaan, tetapi bagaimana menghayatinya hingga bisa meresap sampai ke hati dan kemudian menjelma menjadi kepri badian yang mudah meminta maaf kepada orang lain dan mudah pula memaafkan orang lain.

Sesudah ajaran akhlak dan amaliyah mereka lakukan dengan baik, baru secara perlahan dan bertahap tuan guru Qamaruddin mengajarkan ajaran fiqih, terutama hal-hal pokok yang berkaitan ibadah makhdlah, seperti sembahyang yang wajib lima waktu (Isya, Subuh, Lohor, Ashar dan Maghrib) dengan hal-hal yang mendahuluinya seperti pengetahuan tentang air suci lagi mensucikan, air *musta'mal* dan air najis,

juga *thaharah* cara mandi, *istinja'* dan *wudlu'*. Kemudian tentang puasa, terkait syarat, rukun dan yang membatalkannya. Selanjutnya, zakat dengan segala seluk-beluknya, baik dalam zakat harta maupun zakat fithrah. Berikutnya, haji dengan segala syarat, rukun, seluk-beluk yang terkait dengan seluruh aktivitasnya dan sudah barang tentu manasiknya.

Meskipun mereka tekun berada di majelis tuan guru Qamaruddin, namun mereka tidak dilarang bahkan justru ia menganjurkan untuk rajin ke majelis keilmuan untuk mendengarkan berbagai ajaran Islam yang semestinya wajib mereka tuntutan, seperti ajaran tauhid dasar, ibadah pokok dan sedikit pengetahuan tasawuf. Hal ini untuk menambah dan memperkaya wawasan mereka dalam ilmu agama agar tidak terbelenggu pada satu pendapat, melainkan terbuka untuk melihat pendapat-pendapat lain. Selain itu, majelis ilmu ini akan menjadi ajang pengembalian mereka sebagai manusia bermartabat akan memperoleh pengakuan kembali secara massal tanpa harus digembar-gemborkan.

Tidak cukup dengan sembahyang wajib yang lima waktu, tuan guru Qamaruddin juga sangat menganjurkan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah sunnat, seperti salat *tahajjud*, *hajat*, *taubat*, dan *witir*. karena keempat sembahyang sunnah ini sangat besar fadilahnya di mata Allah dan sangat bermanfaat bagi manusia, apalagi manusia yang barusan insaf. Sembahyang Tahajjud dapat mengangkat derajat seseorang ketinggian ketakwaan yang sangat tinggi. Sembahyang hajat dapat mempercepat makbulnya hajat-hajat dan do'a-do'a selama ini, termasuk hajat do'a sesudahnya. Sembahyang taubat bermanfaat untuk mensucikan jiwa raga sehingga segala nilai kebaikan, kebajikan dan keindahan mudah diterima, sebaliknya segala nilai kejahatan, maksiat dan munkarat mudah tertolak. Sembahyang witir sangat bermanfaat bagi

penyempurna sembahyang wajib kita dan jadi tabir penghalang bagi ketidak baikan dan ketidak patutan. Pelaksanaan sembahyang sunnah ini bisa dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah atau dilaksanakan berjamaah di masjid, langgar dan majelis terutama pada malam-malam hari baik (malam Jum'at, Senin dan Kamis).

Seluruh rangkaian ajaran agama yang diajarkan oleh tuan guru Qamaruddin kepada komunitas preman ini secara perlahan-lahan, tetapi pasti telah berhasil menginsafkan beberapa preman. Dari preman yang dulu miskin harta dan miskin jiwa, sebagian besar telah kembali menjadi manusia yang bermartabat, walaupun masih miskin harta, tetapi sudah kaya hati. Bisa dikatakan di sini perbedayaan ajaran agama ternyata mampu memberdayakan orang yang miskin jiwa berubah menjadi kaya hati dan tidak menutup kemungkinan implikasi lanjutannya adalah merubah orang yang miskin harta menjadi kaya harta, tetapi berbudi.

O. Indikator Aksi yang Dilakukan dalam Pemberdayaan

Dalam hal ini, jalinan kolaborasi peneliti dengan Tuan Guru H. Qamaruddin yang sudah bermukim lama di daerah tersebut dan mengetahui persis bagaimana cara memberdayakan agama pada masyarakat yang selama ini dianggap sebagai *preman*.

Untuk lebih detilnya aksi-aksi berikut akan dilakukan oleh Tim:

1. Secara bersama-sama merumuskan prioritas problem yang ingin diselesaikan dan solusi yang mungkin dilakukan.
2. Analisis sosial, dengan tujuan untuk menimbuhkan kepercayaan atas kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, sekaligus akan merefleksikan kondisi sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Melalui

analisa sosial ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran individu yang kemudian menjadi kesadaran kolektif untuk secara bersama-sama merencanakan sebuah aksi sosial yang bertujuan untuk peningkatan mutu hidup dan lingkungan mereka.

3. Menyusun rencana aksi dan merealisasikan aksi secara bersama-sama. Dalam proses penyusunan rencana aksi, akan dimulai dengan pemetaan masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat setempat. Dengan pemetaan masalah, diharapkan warga secara kolektif menyadari adanya hal-hal yang harus dibenahi untuk meraih tujuan dan cita-cita. Aksi yang akan dilakukan didasarkan pada kesepakatan bersama dari seluruh pihak, sehingga peran warga secara keseluruhan dapat ikut berpartisipasi dan diharapkan dapat semakin memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara komunitas.
4. Refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi ini akan dilakukan setiap kali sebuah aksi selesai dan atau sedang dilakukan. Hal ini untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan dari harapan yang sudah terbangun sebelumnya. Dalam refleksi dan evaluasi ini sangat memungkinkan adanya perubahan strategi atau penambahan aksi. Melalui refleksi dan evaluasi ini, diharapkan akan semakin menumbuhkan sensitivitas warga atas komunitasnya dan kegiatan semacam ini akan terus dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari upaya perubahan sosial menuju peningkatan kualitas yang lebih baik. Setelah adanya refleksi dan evaluasi, akan dilakukan

kembali pemetaan masalah yang ada dalam proses perubahan yang sedang mereka lakukan. Proses ini kembali dilakukan sebagai sebuah siklus yang terus berputar dan tidak akan pernah berakhir. Siklus ini diharapkan terbangun dari warga sendiri sehingga diharapkan masyarakat betul-betul berdaya dan mampu mengubah diri dan lingkungan mereka sendiri secara kolektif.

Jenis pemberdayaan yang kami lakukan bersama H. Qamaruddin adalah:

Pertama, pemberdayaan melalui kegiatan keagamaan, yaitu pengajian rutin setiap hari Selasa pagi di Majelis Taklim Darul Madinah khusus untuk perempuan, dan malam Rabu khusus untuk jamaah laki-laki, sedang pengajian untuk hari Ahad pagi yang pelaksanaannya dimulai dari 07.00-10.00 pesertanya gabungan laki-laki dan perempuan kurang lebih 500 orang di masjid Da'watul Abror. Di samping itu, mereka diajak untuk mengamalkan salawat dan kalimat-kalimat *toyyibah* yang diwiridkan secara konsisten (*istiqamah*) sehingga membuat mereka merasa tenang jiwa raganya.

Demikian juga dengan perlahan-lahan mengajak mereka secara bersama-sama untuk bertaubat dengan banyak membaca *istighfar* dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan jahat dan maksiat yang selama ini mereka lakukan. Mereka diajak oleh Tuan Guru untuk rajin ke majelis keilmuan untuk mendengarkan berbagai ajaran Islam yang semestinya wajib mereka tuntut, seperti ajaran tauhid dasar, ibadah pokok dan sedikit pengetahuan tasawuf, hal ini seperti telah diuraikan di atas.

Setelah itu, mereka diajak oleh Tuan Guru H. Camaruddin bersama-sama untuk melakukan ibadah-ibadah sunnat dengan Tuan Guru, seperti salat *tahajud*, *hajat*, *taubat*, dan *witir*.

Setelah pemberdayaan agama dilakukan kepada komunitas preman

dengan cara-cara santun dan humanis. Ternyata mereka banyak yang tersentuh perasaan keagamaannya ketika sang Tuan Guru memperlakukan mereka secara manusiawi yakni menganggap mereka sebagai manusia juga yang bisa salah dan bisa juga benar, sebagaimana sang Tuan Guru.

Kedua, pemberdayaan yang dilakukan adalah pelatihan Baca Tulis aksara laten bagi mereka yang buta huruf dan aksara. Hal ini dilakukan dengan pemerintah melalui Diknas dengan Program Paket A untuk SD, agar mereka para peserta pemberdayaan mampu baca tulis sehingga mereka lebih mampu beradaptasi dengan kehidupan zaman sekarang.

Ketiga, pemberdayaan yang dilakukan adalah pelatihan menabuh genderang (*memukul tarbang*) untuk mengiring pembacaan syair maulid bagi laki-laki atau perempuan. Mereka ini sering dipanggil orang untuk acara-acara keagamaan, seperti acara maulidan bulan Rabiul Awal, acara isra' mi'raj bulan Rajab, acara hadrah penggiring acara perkawinan, dan lain-lain.



Gambar III.5: Diolah, Group Terbang Tampil dalam Acara Keagamaan 2013

Keempat, membuat penangkaran/sarang burung waled agar peserta pemberdayaan mampu untuk membiayai pengajian lewat ekonomi produktif, sehingga kegiatan majelis ta'lim menjadi mandiri.



Gambar III.6: Diolah, Salah satu Pengasuh Majelis sedang Membersihkan Sarnag Burung Walet

Keadaan seseorang baik ataupun preman, kaya atau miskin termasuk sunatullah. Keadaan itu diciptakan Tuhan berdasarkan sebab-sebab tertentu, kaidah-kaidah yang bersifat tetap dan berlaku umum bagi manusia, berlaku bagi mereka yang beriman dan tidak beriman. Kemiskinan atau musibah yang melanda seseorang tidaklah berarti bahwa ia dibenci Tuhan. Manusia yang sabar dalam menghadapi kesulitan hidup akan dikasihi oleh Tuhan. Jadi, pemberdayaan yang dilakukan terhadap para komunitas preman Kelayan B adalah untuk menguatkan mental dan material mereka dari ketidak-berdayaan menghadapi kesulitan hidup.

Dari hasil pemberdayaan yang dilakukan dapatlah dikatakan, bahwa para komunitas preman Kelayan B telah berubah pola hidupnya dari tingkah laku yang jelek menuju tingkah laku yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat ciri-cirinya: (a)

Mereka selalu bersemangat untuk bekerja, yang dulu mereka bangun pagi untuk bekerja sekitar jam 10.00, tapi saat ini mereka bangun sejak subuh; (b) Mereka juga selalu melakukan kewajiban agama Islam, khusus shalat lima waktu dalam sehari semalam; dan (c) Dulu akhlak mereka sangat kasar dan suka memeras, tapi saat ini akhlak mereka dalam pergaulan sehari-hari sudah cukup santun.

P. Simpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan antara lain:

1. Masyarakat Kelayan B Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki banyak problem kehidupan, seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kriminalitas, dan keagamaan. Mereka sering disebut sebagai masyarakat negatif.
2. Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan ajaran agama yang berkolaborasi dengan Tuan Guru H. Qamaruddin. Hasilnya adalah: (a) Motivasi kerja komunitas preman yang cukup meningkat, sehingga kehidupan ekonomi mereka juga meningkat; (b) Mereka juga selalu melakukan kewajiban agama Islam; dan (c) Dulu akhlak mereka sangat kasar dan suka memeras, tapi saat ini akhlak mereka dalam pergaulan sehari-hari sudah cukup santun.
3. Pemberdayaan agama tersebut seperti mengangkat harkat derajat mereka yang selama ini dicap negatif, sehingga mereka percaya diri untuk hidup layak dan wajar di tengah kehidupan.

Q. Rekomendasi

Pemberdayaan komunitas miskin dengan ajaran agama sangat diperlukan, lebih lagi ulama itu punya kepandaian

praktis yang bermanfaat bagi murid-muridnya dalam mendatangkan keuntungan finansial, seperti peternakan burung walet, membentuk group maulid, membaca *kitab*, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angka Sementara Sensus Penduduk 2010 BPS.
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta, 1999)
- BPS, 2008
- Chambers dalam Nasikun. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2001)
- Chambers Robert., *Pembangunan Desa (Mulai dari belakang)*. LP3ES. Jakarta. 1995
- Freidmeann, *Empowerment (The Politics of Alternative Development)*. Blackwell Publishers Three Cambridge Center USA. 1993.
- Hendarto, Kusumarsono, *Belajar Trading*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 68
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin - cite_note-10
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin - cite_note-11
- <http://www.mediaindonesia.com>
- Margono Slamet, *Memantapkan Posisi dan meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*, (Bogor: Pustaka Wira Usaha Muda. 2000)
- May, C.R., Puffer, S.M., and Mc-Carthy, D.J., "Transferring Management Knowledge to Russia: A Culturally-based Approach". *Academy of Management Executive*. May. Vol 19:2. (akademik.nommensen-id.org/portal/public_html/JURNAL)
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997)
- Penelitian World Bank (2012) dalam Uchida dan Nelson 2008
- Pranarka, A.M.W. & Moelyarto, Vindyandika, , *Pemberdayaan (Empowerment) pemberdayaan, konsep, dan implimentasi*, (Jakarta, Centre for strategic and International studies (CSIS), 1996)
- Puji Hadiyanti, *Kemiskinan Dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 2, Nomor 1, Juni 2006.
- Ragnar Nurkse dalam Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Diterjemahkan oleh D.Guritno. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010)
- Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004)

Sharp 1996 dalam Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997)

Tambunan, Tulus, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2001)

Todaro, Michael, P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid I* (Erlangga: Jakarta, 2000)

Tribun Kalteng.com

Vidhyandika Moeljarto, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program Inpres Desa Tertinggal*. (Jakarta Centre For Strategic And International Studies, 2000).